

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1. Kesimpulan

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses transformasi *Digital Governance* di Kabupaten Wonosobo melalui penerapan Open Sistem Informasi Desa (OpenSID), selanjutnya memetakan tantangan dan faktor-faktor penentu keberhasilan penerapan OpenSID dan bagaimana penerapan OpenSID ini dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan terbuka (*Open Governance*) di Kabupaten Wonosobo.

Dari hasil analisa penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Proses transformasi Digital Governance dengan penerapan OpenSID di Kabupaten Wonosobo melalui 3 tahapan transformasi *publish*, *interact* dan *transact* belum tercapai secara penuh. OpenSID telah berhasil menjadi platform dalam mempublikasikan informasi secara efektif dan. melalui fitur komentar, kanal pengaduan, dan layanan mandiri, OpenSID telah berkembang menjadi platform interaktif yang membantu masyarakat berinteraksi dengan pemerintah desa secara dua arah. Meskipun belum mencapai tahap akhir yaitu transaksi, OpenSID telah mengintegrasikan koneksi ke sistem transaksi yang sudah ada.
2. Studi kasus di kedua desa menunjukkan bahwa penerapan OpenSID sebagai platform *Open Governance* tak lepas dari beberapa tantangan yang dihadapi, diantaranya sebagai berikut:

- a. Sifat Kebijakan: Keterbatasan regulasi di tingkat Kabupaten ternyata berdampak pada belum optimalnya penerapan OpenSID secara penuh, hal ini diperparah dengan status OpenSID yang merupakan sistem informasi yang berawal dari inisiasi di tingkat Desa masih bersifat *volunteer* (sukarela) bukan bersifat *top down (mandatory)* sehingga belum semua desa di Kabupaten Wonosobo menerapkan OpenSID;
- b. Kualitas SDM: Pendidikan dan Pelatihan adalah faktor kunci. Tingkat pendidikan aparatur dan manajemen tim yang dilakukan pimpinan mempengaruhi penerapan OpenSID. Selain itu, minimnya upaya peningkatkan kapasitas yang terstruktur dan berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo mengakibatkan penerapan OpenSID tidak optimal;
- c. Kondisi Geografis masing-masing Desa: Wilayah Kabupaten Wonosobo yang bergunung-gunung dan berbukit menjadi kendala dalam penerapan OpenSID yaitu kendala akses internet. Selain itu Jarak desa dari pusat ibukota kabupaten wonosobo juga mempengaruhi budaya yang berkembang di masyarakat;
- d. Budaya Komunikasi Masyarakat: Masih adanya preferensi komunikasi langsung yang berkembang di masyarakat Wonosobo serta kesenjangan digital di masyarakat, menyebabkan belum semua masyarakat mengakses informasi *online* melalui OpenSID.

Disisi lain, prestasi yang di raih Desa dalam hal keterbukaan informasi baik di tingkat provinsi dan pusat patut dibanggakan dengan faktor-faktor keberhasilan penerapan OpenSID yang dimiliki yaitu sebagai berikut:

- a. *Support Pimpinan*: *Support* pimpinan terdiri dari komitmen dan type kepemimpinan. Di Wonosobo, Bupati dan Kepala Desa menunjukkan komitmen yang kuat terlihat dari dukungan dalam alokasi sumber daya yang dimiliki. Akan tetapi tingkat pendidikan dan type kepemimpinan digital yang *visioner* terhadap penggunaan teknologi ternyata lebih mengoptimalkan penerapan OpenSID di Desa;
- b. Kebijakan Anggaran: Desa di Kabupaten Wonosobo konsistensi dalam penganggaran melalui APBDesa dalam penerapan OpenSID;
- c. Ketersediaan infrastruktur: Konsistensi penganggaran yang dilakukan ternyata berkorelasi positif terhadap terpenuhinya infrastruktur teknis (*hardware*) dan pengembangan OpenSID (*software*) dalam penerapan OpenSID di Kabupaten Wonosobo.

Tantangan dan faktor-faktor penentu keberhasilan ini dapat menjadi referensi atau panduan Kabupaten Wonosobo dalam menyusun strategi untuk meningkatkan dan mempertahankan keberlanjutan keterbukaan informasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan terbuka.

3. Melalui studi kasus penerapan OpenSID di Desa Pucungwetan dan Desa Bumiroso menunjukkan adanya kemajuan penerapan OpenSID di Kabupaten Wonosobo dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Terbuka (*Open Governance*). Dalam hal transparansi, OpenSID telah memiliki kemampuan untuk menyediakan informasi publik dan mudah diakses oleh masyarakat. Meskipun demikian, konsistensi dalam melakukan pembaruan data secara berkala akan menjadi tantangan tersendiri di masa mendatang. Meskipun tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah mencapai 90%, OpenSID masih belum dimanfaatkan dengan optimal sebagai ruang partisipasi digital. Selain itu perlu adanya langkah kolaborasi dengan keterlibatan unsur lain diluar pemerintah untuk lebih optimal dalam mencapai tujuan. Dalam hal akuntabilitas, OpenSID telah digunakan sebagai platform akuntabilitas/pertanggungjawaban kepada masyarakat , akan tetapi pemerintah di tingkat lebih tinggi belum memanfatkan nya sebagai sistem untuk memonitoring dan mengevaluasi sebagai bentuk akuntabilitas vertikal oleh pemerintah desa. Adanya preferensi masyarakat pada komunikasi langsung dengan aparat pemerintah desa, mengakibatkan belum optimalnya penggunaan kanal pengaduan, perlu adanya upaya edukasi dari pemerintah kepada masyarakat terkait hal tersebut.

5.2. Implikasi

Hasil penelitian ini memiliki banyak konsekuensi kebijakan dan praktik di tingkat desa dan kabupaten sebagai berikut:

1. Proses transformasi *Digital Governance* dalam pengembangan *e-government* pada lembaga pemerintah termasuk dalam hal ini OpenSID masih sebatas penyediaan situs web dan interaksi pemerintah dengan masyarakat, atau hanya masih dalam tahap *publish* dan *interact*, belum banyak sampai pada tahap *transact*, sehingga membutuhkan akselerasi pengembangan lebih lanjut hingga pada tahapan yang paling akhir.
2. Pemimpin yang memiliki type kepimpinan digital dan *visioner* terhadap penggunaan teknologi dalam pelayanan publik ternyata meningkatkan keberhasilan penerapan OpenSID di Desa;
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah desa secara berkelanjutnya dapat meningkatkan keberhasilan penerapan OpenSID.
4. Penggunaan Sistem Informasi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan mendukung dapat meningkatkan transparansi, partisipasi publik dan akuntabilitas. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sehingga tata kelola pemerintahan terbuka.

5.3. Saran

1. Untuk Pemerintah Kabupaten
 - a. Penyusunan regulasi yang bersifat mengikat di tingkat kabupaten sangat diperlukan untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam penerapan OpenSID secara menyeluruh untuk mewujudkan Satu Data Desa/ Kelurahan Kabupaten Wonosobo.
 - b. Pemerataan peningkatan kapasitas SDM dari Pemerintah Kabupaten penting untuk mengurangi kesenjangan kompetensi yang terjadi antar Desa.
 - c. Diperlukan pengembangan OpenSID sebagai rumah data desa, dengan integrasi data dari aplikasi-aplikasi *mandatory* pemerintah baik pusat maupun daerah, sehingga OpenSID menjadi jawaban atau solusi atas banyaknya aplikasi yang harus dikerjakan oleh Desa dari Supradesa.
2. Untuk Pemerintah Desa
 - a. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang OpenSID agar masyarakat lebih memahami cara mudah mengakses informasi dan semakin memberikan ruang partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam keputusan publik.
 - b. Pelibatan unsur di luar pemerintah untuk lebih memaksimalkan OpenSID dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan terbuka

- c. Konsistensi dalam pembaruan informasi, hal ini dapat meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
3. Untuk Penggiat Sistem Informasi Desa
 - a. Pengembangkan fitur dalam OpenSID yang lebih interaktif dan ramah pengguna, sehingga masyarakat yang tidak terbiasa dengan teknologi masih dapat dengan mudah mengakses dan menggunakan OpenSID.
 - b. Diperlukan pengembangan yang berkelanjutan untuk mencapai tahap akhir transformasi *Digital Governance* di tingkat Desa di masa yang akan datang sehingga akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, dengan tetap pengutamakan keamanan data.
4. Saran untuk penelitian berikutnya

Penelitian lebih lanjut disarankan untuk dapat menganalisa tahapan proses transformasi *Digital Governance* secara lebih mendalam, tantangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan OpenSID di desa-desa lain dengan berbagai karakteristik. Hal ini akan memberikan wawasan yang lebih luas tentang metode terbaik untuk penerapan OpenSID dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan terbuka.